

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori agensi atau keagenan adalah konsep yang menjelaskan suatu hubungan antara dua orang (pihak) atau lebih, dimana salah satu pihak disebut *principal* (pemegang saham) serta pihak lain disebut *agent* (manajer) (Jensen dan Meckling, 1976). Korelasi keagenan (*agency relationship*) terjadi ketika satu individu atau lebih, yang disebut prinsipal mendelegasikan individu maupun organisasi lain, ke pihak lain yang disebut sebagai agen. prinsipal akan memperkerjakan agen untuk melakukan tugas sesuai kepentingan prinsipal, termasuk pengambilan keputusan, pendelegasian otorisasi, yang berasal dari prinsipal kepada agen. Sedangkan manajer merupakan pihak yang dikontrak untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham, maka pihak manajer wajib mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaannya pada pemegang saham (Retno dan Priantinah, 2012).

Teori agensi mengungkapkan adanya pemisahan antara fungsi kepemilikan (*ownership*) serta fungsi pengendalian (*control*) dalam hubungan keagenan yang tak jarang mengakibatkan *problem* atau masalah keagenan (*agency problems*). Permasalahan keagenan tersebut muncul sebab adanya perseteruan atau perbedaan kepentingan antara para pemegang

saham sebagai prinsipal dengan pihak manajemen menjadi agen. Adanya perbedaan kepentingan tersebut yang mengakibatkan agen mungkin tidak selalu melakukan tindakan atau aksi untuk memaksimalkan kesejahteraan prinsipal, justru lebih mendahulukan kepentingan pribadinya demi memaksimalkan utilitasnya (Nuswandari, 2009).

Lumi dan Wahidahwati (2013) menyebutkan masalah keagenan muncul karena adanya konflik kepentingan antara harapan investor untuk memperoleh *return* maksimal dengan harapan manajer yang mempunyai wewenang mengelola perusahaan dan mengambil keputusan atas nama investor. Prinsipal menginginkan pengembalian yang cepat dan sebesar-besarnya terhadap investasi. Sementara agen menginginkan kepentingannya diakomodir dengan pemberian kompensasi maupun insentif atau bonus maksimal sesuai kinerjanya. Menurut Terzaghi (2012), bila tidak terdapat pengawasan yang memadai para agen dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada prinsipal sebagai pemegang saham akan memainkan beberapa syarat dan kondisi perusahaan supaya seolah-olah telah mencapai target untuk menghindari risiko.

Teori keagenan dapat mengurangi konflik keagenan atau perseteruan kepentingan antara agen menggunakan mekanisme GCG untuk menyelaraskan kepentingan pada suatu perusahaan. Menurut Jensen (1993), dalam teori agensi, dewan komisaris melalui komisaris independen merupakan wakil mekanisme internal utama untuk mengendalikan perilaku oportunisme manajemen untuk membantu menyelaraskan kepentingan

pemegang saham dan manajer. Menurut Effendi (2016), teori agensi menyebutkan bahwa pembentukan komite audit merupakan cara untuk menyelesaikan masalah keagenan. Hal itu dikarenakan fungsi utama komite audit adalah memastikan kualitas laporan keuangan, melakukan *review* pengendalian internal perusahaan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit. Menurut Sudarsi (2008), struktur kepemilikan perusahaan mencerminkan pengawasan manajemen untuk mengurangi biaya keagenan. Salah satu struktur kepemilikan perusahaan adalah kepemilikan manajerial dan instusional. Kepemilikan manajerial berguna ketika manajer berbagi kepemilikan saham perusahaan. Manajer akan berusaha untuk meningkatkan nilai perusahaan sehingga manajer bisa menikmati keuntungan dari bagiannya tersebut. Kepemilikan institusional mempunyai peran penting dalam pengawasan keputusan yang diambil manajemen secara optimal untuk menghindari perilaku oportunistik, sehingga manajer dapat mengurangi biaya keagenan dengan bertindak sesuai kehendak pemegang saham. Investor institusional terlibat pada pengambilan strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Pengawasan tersebut akan menjamin kesejahteraan pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang besar pada pasar modal.

Konflik keagenan adalah konflik yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Teori keagenan dapat memperluas *literature* pembagian risiko dengan memasukkan masalah

keagenan yang muncul ketika pihak yang bekerjasama memiliki tujuan dan visi yang berbeda (Komaruddin dan Affandi, 2020). Eisenhardt (1989) dalam gagasannya membuat asumsi konflik keagenan ini dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, disebut keputusan merugikan (*adverse selection*), terjadi ketika agen tidak dapat memberikan kemampuannya. Kedua, disebut *moral hazard*, yaitu keadaan lingkungan yang bertentangan dengan kepentingan prinsipal karena kelalaian tanggung jawab agen bertindak untuk kepentingannya sendiri.

Konflik kepentingan akan membuat perusahaan menanggung biaya keagenan (*agency cost*) yang akan menjunjung pengawasan yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan berbagai pihak yang dapat dilakukan melalui penerapan mekanisme GCG untuk meminimalisir terjadinya perbedaan kepentingan dengan menyeimbangkan kebutuhan berbagai pemangku kepentingan antara prinsipal dan agen, sehingga bisa mengurangi biaya agensi yang timbul demi menjaga hak-hak pemegang saham yang kemudian akan menambah kinerja perusahaan. Konsep GCG berkaitan dengan bagaimana para pemegang saham yakin bahwa manajer akan memberikan laba atau keuntungan bagi mereka dan tidak akan merugikan dengan melakukan kecurangan-kecurangan dengan menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check dan balance*) untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya serta tetap mendorong pertumbuhan perusahaan (Purbopangestu dan Subowo, 2014).

### 2.1.2 Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Dowling dan Pfeffer (1975) mengembangkan teori legitimasi yang merupakan teori hubungan antara masyarakat dengan perusahaan. Teori legitimasi dianggap penting dalam menganalisis hubungan antara organisasi dan lingkungannya, adanya legitimasi dapat membatasi tindakan organisasi terhadap lingkungannya sesuai norma sosial dan nilai yang berlaku. Teori legitimasi menyebutkan semakin besar kemungkinan perubahan yang merugikan dalam persepsi sosial tentang bagaimana sebuah organisasi beroperasi, maka semakin besar keinginan organisasi untuk menanggapi perubahan persepsi sosial ini. Legitimasi dipandang sebagai cara untuk menjaga kelangsungan hidup suatu organisasi yang dapat diterima secara luas oleh masyarakat melalui kegiatan organisasi yang sesuai aturan.

Menurut Chariri dan Ghozali (2014), teori legitimasi didasari kontrak sosial antara perusahaan dan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber daya ekonomi. Kontrak sosial tersebut dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan jika masyarakat merasa organisasi telah melanggar kontrak sosialnya. Dimana jika masyarakat merasa tidak puas dengan operasi organisasi secara sah (*legitimate*) maka masyarakat dapat mencabut kontrak sosial dalam operasi organisasi, sehingga perusahaan harus berperilaku dalam koridor-koridor dapat diterima oleh lingkungan demi melanjutkan usahanya sehingga berjalan sukses.

Perusahaan harus berusaha menyelaraskan nilai-nilainya dengan nilai-nilai masyarakat agar persatuan ini dapat terjalin. Salah satu hal untuk mendapatkan legitimasi di masyarakat di mana mereka beroperasi adalah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keunggulan kompetitif atas pesaing, memenuhi persyaratan kontrak pinjaman, memenuhi kebutuhan masyarakat, melegitimasi tindakan perusahaan, dan menarik investor (Fauzi, 2016).

Teori legitimasi ini sesuai dengan pengungkapan CSR dimana perusahaan akan menggunakan laporan tahunan untuk menggambarkan tanggung jawab lingkungan mereka yang merupakan bentuk pengabdian perusahaan untuk menyisihkan sebagian harta perusahaan untuk mengecilkan dampak negatif yang dapat terjadi akibat dari kegiatan operasional perusahaan serta upaya perusahaan untuk meningkatkan dampak positif dari operasi perusahaan terhadap semua pihak berkepentingan terutama pihak sosial dan lingkungan. Perusahaan melakukannya karena bisnis yang dapat memenuhi harapan masyarakat akan memperoleh pengakuan dan dukungan komunitas (Sari, 2016).

Legitimasi melindungi perusahaan dari hal-hal yang tidak diinginkan dan meningkatkan nilai perusahaan tersebut yang berdampak ke kinerja keuangan. Namun perusahaan harus selalu sadar dan waspada bahwa selalu ada potensi kehilangan legitimasi tersebut kapan saja, dimana legitimasi ini dapat ditarik apabila masyarakat menilai bahwa perusahaan tidak melakukan hal-hal yang diwajibkan kepada masyarakat (Putri, 2012).

### 2.1.3 Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*)

Teori *stakeholder* merupakan teori yang mendeskripsikan pada pihak mana perusahaan akan bertanggungjawab. *Stakeholder* artinya semua pihak baik internal dan eksternal yang mempunyai korelasi, baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Keduanya memiliki kepentingan sama terhadap sumber daya perusahaan. Menurut Ghozali dan Chariri (2007), Teori *stakeholder* menyebutkan bahwa perusahaan bukan merupakan entitas yang hanya beroperasi demi kepentingannya sendiri untuk bertanggung jawab terhadap *shareholder*-nya (pemilik saham) tetapi juga harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya (kreditor, *supplier*, analis, konsumen, pekerja, perusahaan pesaing, pemerintah, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga diluar perusahaan dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan kepada perusahaan tersebut oleh para *stakeholder*-nya.

Ghozali dan Chariri (2007) menyebutkan bahwa perusahaan wajib menjaga hubungan baik kepada *stakeholder*-nya dengan mengakomodasi kebutuhan dan keinginan para *stakeholder*-nya, terutama yang memiliki *power* terhadap ketersediaan sumber daya untuk aktivitas operasional perusahaan, seperti tenaga kerja, pasar atas produk perusahaan dan lain-lain. Gray (1994) mengatakan keberlangsungan hidup perusahaan bergantung pada dukungan para *stakeholder* dimana tugas perusahaan ialah melakukan aktivitas untuk mencari dukungan tersebut.

Suatu entitas tidak dapat terlepas dari *stakeholder*-nya. Keduanya mempunyai ikatan, apabila perusahaan memiliki hubungan yang baik dengan *stakeholder* nantinya akan menciptakan citra baik yang dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut, yang akan berdampak ke kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus menciptakan strategi yang digunakan untuk menjaga hubungan dengan para *stakeholder* dengan berkewajiban untuk mengungkapkan laporan sebagai informasi bagi *stakeholder*. Laporan tersebut terdiri atas laporan keuangan dan laporan tahunan dimana didalamnya termasuk pengungkapan CSR dan GCG yang sangat banyak melibatkan *stakeholder* (Mardikanto, 2014).

Perusahaan harus menyajikan informasi lebih lengkap menggunakan pengungkapan informasi aktivitas sosial dan lingkungan sebagai keunggulan dibanding kompetitor. Pengungkapan sosial menjadi bagian yang berasal dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholder*-nya. Dengan menggunakan pengungkapan ini, diharapkan perusahaan mampu memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan demi sinyal positif bagi investor untuk berinvestasi pada perusahaan yang berimbas pada peningkatan harga saham. Melalui pengungkapan tanggung jawab sosial, perusahaan akan memperhatikan masyarakat dan lingkungan untuk menjaga kepentingan dan harapan, baik dari perusahaan maupun masyarakat dan lingkungan sekitarnya serta dapat mengelola *stakeholder* untuk mendapat dukungan yang berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan (Terzaghi, 2012).



## **2.2 Good Corporate Governance (GCG)**

### **2.2.1 Pengertian GCG**

Menurut Rusdiyanto dkk (2019), GCG adalah suatu proses atau sistem yang dibuat untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan ke arah yang lebih baik, dengan mencegah timbulnya kecurangan atau suatu kesalahan yang berasal dari pihak manajemen, yang bisa merugikan *shareholder* khususnya, dan *stakeholder* pada umumnya. GCG adalah seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan. GCG dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan professional.

*The Indonesian Institute for Corporate Governance* (2010) menggambarkan GCG sebagai sistem, struktur, serta proses yang dipergunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberi nilai tambah perusahaan pada jangka panjang secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, dengan berdasarkan etika, moral, budaya serta hukum berlaku lainnya. Dari defenisi-defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa GCG merupakan suatu proses yang digunakan untuk meningkatkan suatu nilai perusahaan tanpa mengabaikan para pemegang saham lainnya serta tetap mengikuti aturan yang berlaku.

### 2.2.2 Tujuan GCG

Siswanto (2008) menjelaskan, tujuan dari GCG adalah sebagai berikut:

- a. Melindungi hak serta kepentingan pemegang saham.
- b. Melindungi hak serta kepentingan anggota *stakeholder* non pemegang saham.
- c. Menambah nilai perusahaan dan para pemegang saham.
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dewan pengurus atau *Board of Directors* serta manajemen perusahaan.
- e. Meningkatkan mutu dan hubungan *Board of Directors* beserta manajemen senior perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari *corporate governance* adalah untuk melindungi hak serta kepentingan seluruh pihak yang memiliki korelasi dengan perusahaan. Variabel GCG akan ikut menginteraksi hubungan antara kinerja keuangan serta nilai perusahaan dalam suatu kondisi tertentu. GCG yang diterapkan kedalam lingkungan suatu perusahaan bisa mempengaruhi nilai perusahaan yang akan berdampak ke kinerja keuangan. Semakin besar penerapan GCG dalam lingkungan perusahaan diperlukan untuk membantu menghubungkan dengan kinerja perusahaan yang akan semakin meningkat dan kelangsungan hidup perusahaan akan terjamin.

Dari uraian diatas, GCG diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap nilai perusahaan yang dimana penerapan GCG yang baik akan terlihat berasal dari kinerja perusahaan yang meningkat seiring menguatnya citra perusahaan.

### 2.2.3 Manfaat GCG

*Indonesia Institute for Corporate Governance* (2010) menyatakan bahwa penerapan GCG dalam rangka pemenuhan kepatuhan, atau sebab kebutuhan, maupun juga memanfaatkan pembelajaran yang ada, akan memberikan manfaat bagi perusahaan diantaranya :

- a) Mempertahankan *going concern* suatu perusahaan
- b) Menambah nilai perusahaan serta kepercayaan pasar
- c) Mengurangi *agency cost* serta *cost of capital*
- d) Meningkatkan efisiensi, kinerja, dan pelayanan pada *stakeholder*
- e) Melindungi organ terhadap intervensi politik dan tuntutan hukum
- f) Membantu terwujudnya *good corporate citizen*.

Sedangkan, dalam *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (Pranata, 2007) mengungkapkan penerapan *corporate governance* akan memberikan beberapa manfaat diantaranya yaitu:

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, menambah efisiensi aktivitas operasional perusahaan serta meningkatkan pelayanan pada *stakeholder*.

- b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga bisa meningkatkan *corporate value*.
- c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya.
- d. Membuat pemegang saham merasa puas dengan kinerja perusahaan sebab sekaligus akan meningkatkan deviden serta *stakeholder value*.

Penerapan GCG juga memberikan manfaat kepada organ maupun anggota perusahaan demi mendukung pencapaian kinerja perusahaan, mengurangi *agency cost*, pemenuhan akuntabilitas, menjaga independensi, profesionalisme organ dan anggota perusahaan, mengelola risiko, memenuhi kepatuhan, maupun hal lain yang akan berdampak pada kesinambungan perusahaan, melanjutkan hubungan yang adil, beretika serta bermartabat.

#### **2.2.4 Prinsip GCG**

Prinsip dasar GCG adalah demi memberikan kemajuan kepada kinerja perusahaan. Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2007) menyebutkan, asas GCG terdiri atas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran serta kesetaraan diperlukan demi mencapai kesinambungan usaha (*sustainabaility*) perusahaan tanpa mengabaikan pemangku kepentingan (*stakeholder*).

##### **1. Tranparansi (*Transparency*)**

Demi menjaga objektivitas di dalam menjalankan bisnis, informasi yang relevan wajib disediakan oleh perusahaan menggunakan cara yang praktis dan mudah dipahami bagi para pemangku kepentingan.

Perusahaan harus berinisiatif mengatakan tidak hanya dilema yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang krusial untuk mengambil keputusan bagi pemegang saham, kreditur, serta pemangku kepentingan lainnya.

## 2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus bisa mempertanggungjawabkan kinerjanya secara wajar dan transparan. Oleh karena itu perusahaan wajib dikelola secara benar, terukur, dan sinkron dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya.

## 3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan sehingga pada jangka panjang bisa memelihara kesinambungan usaha serta mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

## 4. Independensi (*Independency*)

Perusahaan wajib dikelola secara independen sehingga nantinya masing-masing organ perusahaan tidak akan saling mendominasi serta tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

## 5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan wajib senantiasa memperhatikan kepentingan para pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya sesuai asas kesetaraan dan kewajaran.

Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan GCG dalam mengelola sebuah perusahaan, sebaiknya diimbangi menggunakan *goodfaith* (bertindak atas itikad baik) serta kode etik yang dilandasi oleh integrasi perusahaan untuk mencapai keberhasilan perusahaan pada jangka panjang.

### **2.2.5 Mekanisme GCG**

Mekanisme adalah cara kerja sistematis untuk memenuhi persyaratan tertentu. Mekanisme *corporate governance* adalah suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan kepada pihak yang melakukan pengendalian atau pengawasan keputusan tersebut. Mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* terbagi menjadi dua kelompok yaitu internal dan eksternal (Sutedi, 2012).

*External mechanisms* dipengaruhi oleh faktor eksternal perusahaan termasuk investor, akuntan publik, pemberi pinjaman atau kreditur dan lembaga yang mengesahkan legitimasi, seperti pengendalian oleh perusahaan dan pengendalian pasar menggunakan cara mempengaruhi perusahaan selain menggunakan mekanisme internal. Sedangkan *internal mechanisms* adalah cara mengendalikan perusahaan melalui struktur dan proses yang dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan termasuk faktor internal seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komposisi dewan dan direksi.

Dalam penelitian ini, kerangka mekanisme *corporate governance* yang diadopsi dari penelitian Chasanah (2020), Sholihah (2021), dan Ningsih (2021) meliputi komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, serta kepemilikan institusional.

#### 1. Komisaris Independen

Menurut Pasaribu (2015), komisaris independen adalah dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak memiliki hubungan kepengurusan, keuangan, kepemilikan saham atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris atau direksi perusahaan yang diharapkan dapat fokus pada kepentingan pemegang saham. Adanya komisaris independen bertujuan agar perusahaan dapat mengambil keputusan secara efektif, akurat, dan independen sesuai prinsip GCG.

Pengangkatan Komisaris Independen diatur Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan BAPEPAM dan BEI No. 1-A/14/7/2004, mengatur kehadiran minimal adalah 30% komisaris independen. Komisaris dipandang sebagai alat untuk pemantauan dan memberikan tekanan yang objektif dan independen yang nantinya akan memberikan lebih banyak informasi dengan membuat perilaku manajemen dengan informasi transparan. Komisaris independen memegang kendali dalam pengawasan arah perusahaan untuk melakukan operasional sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik (Purbopangestu, 2014).

Komisaris independen berperan penting untuk melaksanakan fungsi pengawasan tidak hanya melihat kepentingan pemilik tetapi juga kepentingan perusahaan umumnya untuk menciptakan perusahaan yang baik dengan mendorong penerapan GCG demi memastikan perusahaan mematuhi hukum dan undang-undang berlaku dan nilai-nilai yang diterapkan dalam operasional perusahaan (Sanjaya dkk, 2012).

## 2. Komite Audit

Menurut Kep. 29/PM/2004, komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertugas untuk melakukan pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dari sistem pengendalian perusahaan, jadi keberadaannya sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit juga dianggap penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan manajemen dalam menangani masalah pengendalian.

Menurut Surat Edaran BEI, SE-008/BEJ/12-2001, komite audit paling sedikit keanggotaannya terdiri dari tiga orang termasuk ketua komite audit. Hanya ada sebanyak satu orang anggota komite ini yang berasal dari komisaris, anggota komite yang berasal dari komisaris tersebut adalah komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite audit. Anggota selain komisaris independen harus merupakan perwakilan pihak eksternal yang independen. Menurut Tunggal (2002), komite audit memiliki tugas yang mencakup:



- a) Meningkatkan disiplin korporasi dan lingkungan pengendalian untuk mencegah kecurangan dan penyalahgunaan.
- b) Memperbaiki mutu dan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi pelaporan keuangan.
- c) Memperbaiki ruang lingkup, efektivitas dan akurasi biaya dari audit eksternal, independensi dan objektivitas dari auditor eksternal.

### 3. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat diukur dengan menghitung proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan relatif terhadap jumlah saham perusahaan yang beredar. Salah satu mekanisme GCG yang digunakan manajemen untuk mengurangi *agency cost* adalah meningkatkan kepemilikan saham. Kepemilikan manajerial menunjukkan peran ganda manajer yang akan mengoptimalkan keuntungan dengan tidak membuat perusahaan mengalami kerugian yang berdampak pada hilangnya insentif dan *return* dari investasinya.

Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen dapat mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer dengan menyelaraskan kepentingan pemegang saham dengan kepentingan manajer. Dari sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba terutama ditentukan oleh motivasi para manajer perusahaan.

#### 4. Kepemilikan Institusional

Menurut Pasaribu (2015), kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh investor institusional yang dapat diukur sebagai persentase saham yang dimiliki institusi dalam perusahaan. Pemegang saham institusional biasanya diwakili oleh entitas seperti perbankan, asuransi, dana pensiun, reksadana maupun institusi lain. Investor institusional cenderung menjadi pemegang yang cukup besar karena memiliki pendanaan yang besar. Kekayaan yang besar akan mempengaruhi dan berdampak besar pada pengambilan keputusan sebuah perusahaan (Karima, 2014).

Menurut Murwaningsari (2009), kehadiran investor institusional diyakini dapat menjadi mekanisme yang efektif dalam monitoring setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan sulit untuk tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba karena investor insitusional terlibat dalam pengambilan keputusan yang strategis.

Investor institusional memiliki kemampuan lebih baik dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang merupakan tempat mereka memiliki saham di perusahaan tersebut. Hal tersebut dikarenakan mereka memiliki kemampuan untuk mengawasi kinerja perusahaan dengan memprioritaskan pada sumber daya, kemampuan, pengalaman, dan kesempatan nilai perusahaan dalam jangka panjang (Pasaribu, 2015).

## **2.3 Corporate Social Responsibility (CSR)**

### **2.3.1 Pengertian CSR**

CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan dapat disebut sebagai komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi, dengan berkerjasama dengan karyawan dan perwakilannya, komunitas ataupun masyarakat sekitar perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup dan memberi manfaat baik bagi perusahaan maupun untuk pembangunan. CSR merupakan bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat di sekitarnya melalui pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memelihara lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, dan tanggung jawab sosial lainnya (Nuryana & Bhebhe, 2019). CSR seperti yang diatur UU RI No.40 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan salah satu informasi yang wajib dicantumkan dalam laporan tahunan perusahaan yang mewajibkan perseroan yang dalam kegiatan usahanya wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

### **2.3.2 Tujuan CSR**

Alasan utama pengungkapan CSR adalah untuk memungkinkan pihak investor dapat melakukan suatu *informed decision* ketika membuat keputusan investasi. Perusahaan akan mengungkapkan informasi tentang kegiatan CSR yang telah dilakukan untuk membangun hubungan komunikasi yang baik dan efektif antara perusahaan dengan masyarakat

maupun *stakeholder* lainnya tentang bagaimana perusahaan telah mengintegrasikan kepedulian dalam semua aspek kegiatan operasinya. Dengan mengungkapkan informasi-informasi mengenai aktivitas CSR yang dilakukan dalam operasi perusahaan sebagai bagian dari kegiatan lingkungan, perusahaan dapat memperoleh kepercayaan serta dukungan dari publik maupun *stakeholder* lainnya (Djuitaningsih dan Wahdatul, 2012).

CSR merupakan mekanisme dimana organisasi secara sukarela mengintegrasikan kepedulian lingkungan dan sosial ke dalam operasi mereka serta keterlibatan dengan *stakeholders*, diluar tanggung jawab dibidang hukum organisasi. Secara sederhana, CSR dapat dikatakan sebagai timbal balik perusahaan karena perusahaan telah mengambil keuntungan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya (Endiana, 2019).

### **2.3.3 Manfaat CSR**

Menurut Prihanto (2018), manfaat CSR yaitu:

#### 1) Bagi perusahaan

CSR memungkinkan perusahaan untuk tumbuh, berkelanjutan dan memiliki citra positif oleh masyarakat luas. Perusahaan akan lebih mudah memiliki akses terhadap modal. Perusahaan juga dapat mempertahankan sumber daya manusia, dan perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis.

## 2) Bagi masyarakat

CSR akan meningkatkan nilai tambah pada perusahaan di suatu daerah dengan menyerap tenaga kerja serta meningkatkan kualitas sosial. Apabila terdapat masyarakat adat atau warga lokal, maka penerapan CSR akan menghormati keberadaan tradisi dan budaya lokal.

## 3) Bagi lingkungan

CSR akan menjaga kualitas lingkungan dengan mencegah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam, dan mengurangi tingkat pencemaran yang sebenarnya berdampak pada lingkungan perusahaan.

## 4) Bagi negara

CSR yang baik akan mencegah “*corporate misconduct*” atau malpraktik bisnis seperti halnya penyuapan pejabat publik atau aparat penegak hukum yang memicu tingginya tingkat korupsi. Setelah itu, negara akan mendapatkan keuntungan dari konsekuensi pajak yang wajar.

### **2.3.4 Prinsip CSR**

Mardikanto (2014) menyatakan bahwa implementasi CSR didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

#### 1. Prinsip kepatuhan hukum

Perusahaan harus mematuhi semua aturan lokal dan internasional yang dinyatakan secara tertulis maupun tidak tertulis, sesuai dengan prosedur tertentu.

## 2. Kepatuhan terhadap hukum adat internasional

Perusahaan harus mematuhi pedoman, keputusan, peraturan pemerintah, deklarasi dan atau perjanjian internasional ketika mengembangkan kebijakan dan praktik yang terkait dengan tanggung jawab sosial.

## 3. Menghormati *stakeholder* terkait.

Perusahaan harus mengakui dan menerima keragaman *stakeholder* yang relevan dan keragaman mitra perusahaan (baik besar maupun kecil) serta unsur-unsur yang dapat mempengaruhi *stakeholder* terkait.

## 4. Prinsip Transparansi

Perusahaan harus menyatakan kebijakan, keputusan, dan kegiatan secara jelas, akurat, dan komprehensif termasuk dalam pengenalan terhadap potensi lingkungan dan masyarakat. Informasi tersebut harus tersedia bagi masyarakat yang terdampak, atau bagi mereka yang mungkin memiliki pengaruh secara material oleh perusahaan.

## 5. Menghormati hak asasi manusia

Perusahaan harus menerapkan kebijakan dan praktik yang akan menghormati hak asasi manusia yang dimuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

### **2.3.5 Pengukuran CSR**

Pertanggungjawaban sosial perusahaan dituangkan dalam laporan melalui laporan tahunan atau *annual report* maupun laporan berkelanjutan atau *sustainability reporting*. Laporan tahunan adalah laporan

perkembangan dan pencapaian yang berhasil diraih organisasi dalam periode satu tahun. Laporan berkelanjutan adalah pelaporan tentang dampak kebijakan ekonomi, lingkungan, sosial, pengaruh serta kinerja organisasi dan produknya dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pengungkapan tanggung jawab sosial dapat diukur menggunakan proksi *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* (CSRDI) berdasarkan *Global Reporting Initiative* (GRI). GRI adalah kerangka pelaporan untuk menghasilkan laporan tahunan atau laporan berkelanjutan yang terdiri dari prinsip-prinsip pelaporan, pedoman pelaporan serta standar pengungkapan (termasuk indikator kinerja). Kategori pengungkapan CSR yang menerapkan standar GRI terdiri dari 3 fokus pengungkapan, yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial sebagai dasar laporan berkelanjutan (Dahlia dan Siregar, 2008).

GRI (2016) menerbitkan pedoman yang perlu diungkapkan oleh perusahaan-perusahaan terkait tanggung jawab sosial dalam bentuk *GRI Standard* Tahun 2016. Indikator pengungkapan CSR berdasarkan *GRI Standard* Tahun 2016 adalah Indikator kinerja ekonomi, Indikator kinerja lingkungan, dan Indikator kinerja sosial yang terdapat penjelasan sejumlah 77 item didalam indikator-indikator tersebut.

GRI terdiri dari 3 (tiga) fokus pengungkapan, yaitu ([www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org)):

### 1. Dimensi Ekonomi

Aspek ekonomi dari perspektif keberlanjutan organisasi berdampak pada kondisi ekonomi, sistem ekonomi dari *stakeholder* yang ada pada tingkat lokal maupun tingkat global. Indikator ekonomi menggambarkan:

- Arus modal di antara pemangku kepentingan berbeda
- Dampak ekonomi utama dari seluruh organisasi masyarakat.

### 2. Dimensi Lingkungan

Aspek lingkungan terkait dengan keberlanjutan organisasi dan mempengaruhi kehidupan dalam sistem alam, seperti ekosistem, tanah, udara, dan air. Indikator kinerja lingkungan terkait dengan *input* (bahan, energi, air) dan *output* (emisi/gas, limbah kering/basah, sampah). Selain itu, kinerja mereka mencakup kinerja yang terkait dengan kepatuhan lingkungan, keanekaragaman hayati, serta informasi terkait lainnya seperti limbah lingkungan dan dampak dari produk dan layanan jasa.

### 3. Dimensi Sosial

Aspek sosial yang berkaitan dengan keberlangsungan suatu organisasi mempengaruhi sistem sosial yang dijalankan organisasi tersebut. Indikator kinerja sosial GRI mengidentifikasi aspek-aspek utama kinerja, termasuk praktik ketenagakerjaan, hak asasi manusia, masyarakat/sosial, dan tanggung jawab produk.

Keberlanjutan adalah tujuan akhir yang ingin dicapai, tidak hanya dalam perspektif perusahaan tetapi juga masyarakat luas secara keseluruhan. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut dicapai melalui suatu proses yang



dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, CSR berperan sebagai sarana dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan akhir, yang akan bermuara pada pencapaian *sustainability*. Hal ini mencerminkan terwujudnya keseimbangan dari konsep *Triple Bottom Line* yang diimplementasikan dalam kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan, melalui keseimbangan *economy/profit, environment/planet, dan social/people*.

#### **2.4 Kinerja Keuangan**

Menurut Sari (2016), kinerja keuangan adalah suatu usaha formal yang dilakukan oleh suatu perusahaan dimana perusahaan dapat mengukur keberhasilannya dalam menghasilkan keuntungan untuk melihat potensi prospek, pertumbuhan, dan perkembangan baik perusahaan dengan mengandalkan sumber yang ada. Menurut Widhianingrum dan Amah (2012), kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan efektifitas dan efisiensi suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Investor yang mengukur kinerja suatu perusahaan biasanya melihat hasil kinerja keuangan yang tercermin dalam rasio berbeda. Posisi keuangan serta tingkat kinerja keuangan suatu perusahaan dapat diketahui perkembangan atau kecenderungan kinerja keuangan perusahaan melalui analisis rasio (Wardoyo, 2013).

Menurut Sarafina dan Saifi (2017), kinerja keuangan suatu perusahaan merupakan gambaran dari kondisi keuangan perusahaan dalam suatu

periode akuntansi. Kinerja keuangan adalah kriteria utama untuk mengevaluasi seberapa baik kinerja perusahaan, seperti yang terlihat dalam laporan keuangannya. Kinerja keuangan perusahaan dapat dinilai melalui ROA. Penilaian prestasi suatu perusahaan dapat dinilai dari kemampuannya dalam menghasilkan laba. Laba perusahaan dapat diketahui dengan menggunakan rasio profitabilitas yaitu ROA. Aset adalah semua kekayaan perusahaan yang berasal dari modal sendiri maupun asing yang telah diubah menjadi aktiva demi kelangsungan hidup perusahaan (Sari dkk, 2016).

#### **2.4.1 Pengertian ROA**

ROA merupakan salah satu indikator penting dalam laporan keuangan yang digunakan untuk berbagai tujuan. ROA merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total aktiva mengukur tingkat pengembalian investasi total atau ROA. ROA digunakan dalam mengukur kemampuan pihak manajemen perusahaan untuk menghasilkan keuntungan (laba), jika semakin besar ROA maka semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh perusahaan yang berdampak semakin baik pula posisi perusahaan dari segi penggunaan aktiva. Alasan memilih variabel ROA, karena ROA mewakili efektifitas "*earning power*" perusahaan yang mencerminkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba bersamaan dengan aset yang ada. Maka dapat diketahui apakah perusahaan tersebut telah efektif dan efisien dalam mengelola aset yang dimiliki untuk kegiatan operasional perusahaan dalam memperoleh laba yang besar (Hery, 2016).

### 2.4.2 Tujuan ROA

ROA adalah suatu rasio yang membandingkan laba setelah pajak dengan aset perusahaan, rasio ini digunakan untuk menentukan seberapa besar suatu laba yang diperoleh perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki. Menurut Hery (2016), tujuan ROA sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan suatu laba selama periode waktu tertentu.
2. Untuk mengetahui dan menilai posisi laba pada suatu perusahaan antara tahun sebelumnya dengan saat ini.
3. Untuk mengetahui dan menilai bagaimana perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk mengetahui dan mengukur seberapa besar jumlah suatu laba bersih yang akan dihasilkan dan yang akan tertanam dalam total aset.
5. Untuk mengetahui dan mengukur seberapa besar jumlah suatu laba bersih yang akan dihasilkan dan yang akan tertanam dalam total ekuitas.
6. Untuk mengetahui dan mengukur margin laba kotor dari penjualan bersih.
7. Untuk mengetahui dan mengukur margin laba operasional dari penjualan bersih.
8. Untuk mengetahui dan mengukur margin laba bersih dari penjualan bersih.

### 2.4.3 Manfaat ROA

Menurut Kasmir (2019), manfaat ROA adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diterima perusahaan selama periode waktu tertentu.
2. Mengetahui perbandingan posisi laba dari tahun sebelumnya.
3. Mengetahui perkembangan laba perusahaan dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui jumlah laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas penggunaan seluruh dana perusahaan termasuk modal pinjaman dan modal sendiri.

### 2.4.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi ROA

Menurut Hani (2015), beberapa faktor yang mempengaruhi nilai profitabilitas adalah pendapatan, modal kerja, beban, pemanfaatan aset baik aset lancar maupun aset tetap, kepemilikan ekuitas dan lainnya. Besarnya ROA akan berubah jika ada perubahan dari pendapatan, modal kerja, beban dan pemanfaatan aset. Dengan demikian, pemimpin perusahaan dapat menggunakan salah satu atau semuanya untuk meningkatkan ROA.

Menurut Munawir (2014), ROA dipengaruhi dua faktor, yaitu :

- 1) *Turnover dari operating asset*

Merupakan tingkat perputaran aktiva digunakan dalam operasi.

- 2) *Profit margin*

Merupakan tingkat besaran suatu keuntungan operasi yang dinyatakan sebagai persentase dari jumlah penjualan bersih. *Profit margin* akan

mengukur tingkat keuntungan yang dapat dihasilkan perusahaan yang dihubungkan dengan penjualannya. Semakin tinggi nilai tingkat perputaran aktiva digunakan dalam operasional, maka semakin tinggi *profit margin* dihasilkan. Besarnya ROA dapat berubah jika *profit margin* ataupun *turnover* aset mengalami perubahan secara masing-masing atau keduanya.

#### 2.4.5 Pengukuran ROA

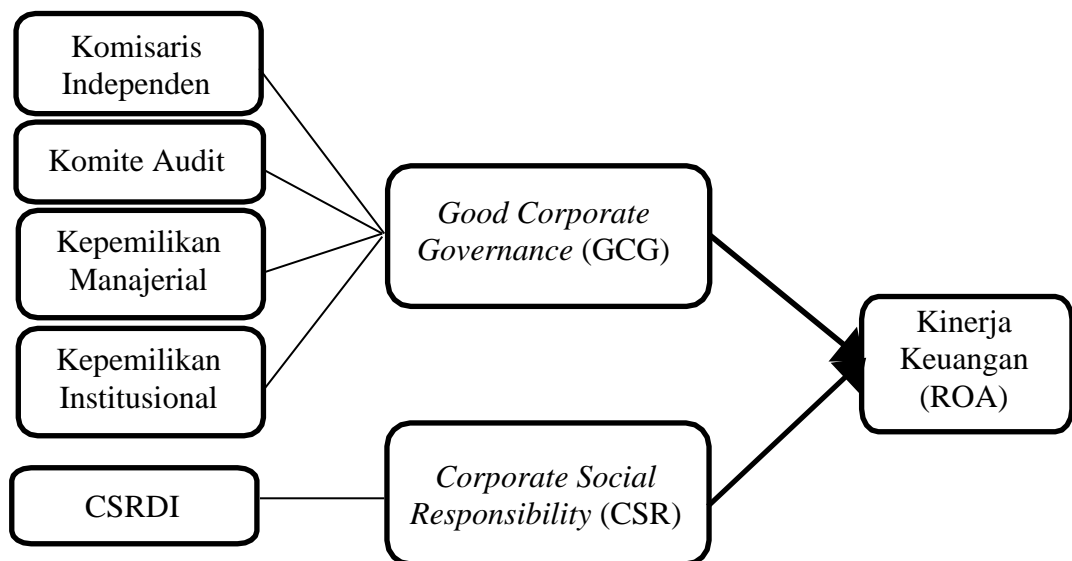
Menurut Fahmi (2018), pengukuran *return on asset* (ROA) dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\textit{Return on Asset} = \frac{\textit{Laba bersih setelah pajak}}{\textit{Total aset}} \times 100\%$$

Dari rumus diatas, dapat dijelaskan bahwa ROA merupakan perbandingan antara laba setelah pajak dan total aktiva, semakin tinggi rasio ini maka semakin tinggi pula laba setelah pajak yang diperoleh dari mengelola aktiva perusahaan, sebaliknya jika semakin rendah nilai rasio ROA maka semakin rendah pula laba setelah pajak.

## 2.5 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menjelaskan mengenai hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti serta menggambarkan proses penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya seperti oleh Chasanah (2020) menyimpulkan bahwa hubungan antara variabel GCG dan CSR dengan ROA sebagai hubungan yang positif atau searah, artinya apabila satu variabel mengalami kenaikan maka variabel yang lain akan mengalami kenaikan juga. Berdasarkan dari rumusan masalah dan teori yang terkait maka kerangka pemikiran yang dapat digambarkan adalah sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Rerangka Konseptual

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Sejati, dkk (2018)	Pengaruh GCG Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Industri <i>Real Estate</i> dan Property di BEI Periode 2014-2016	X = Komisaris Independen,  Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial  Y = ROA	Berpengaruh terhadap kinerja keuangan  Tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan
Aji (2019)	Interaksi Manajemen Laba dalam Pengungkapan CSR dan Kinerja Keuangan Sektor Manufaktur Tahun 2016-2018	X = CSR  Y = ROA	Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan
Insani (2019)	Analisis Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> Terhadap Kinerja Keuangan Pada Seluruh Perusahaan LQ45 Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018	X = CSR  Y = ROA	Berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA).
Wiariningsih, dkk (2019)	Pengaruh GCG dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2016	X = Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit,  Kepemilikan Manajerial  Y = ROA	Tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan  Berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan

Adnyani (2020)	Pengaruh Penerapan GCG dan CSR Terhadap Kinerja Perusahaan Tahun 2016-2018	X = Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komite Audit  CSR  Y = ROA	Tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan  CSR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.
Chasanah (2020)	Pengaruh GCG dan CSR Terhadap Kinerja Keuangan Studi Empiris pada Perusahaan <i>Food &amp; Beverages</i> Tahun 2013-2018	X = Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Komite audit, Kepemilikan Institusional, CSR  Y = ROA	Berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan  Tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
Hasna (2020)	Pengaruh CSRD, <i>Enviromental Performance</i> dan GCG Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018)	X = Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, CSR  Y = ROA	Berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA).
Aziz, dkk (2021)	Pengaruh GCG, Modal Intelektual, Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Makanan Tahun 2017-2019	X = Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit  Y = ROA	Tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.  Berpengaruh terhadap kinerja keuangan



Ningsih (2021)	Pengaruh GCG dan CSR Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Keuangan di BEI Tahun 2014-2018	X = Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, CSR  Y = ROA	Secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA).
Paskaboni (2021)	Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan yang Terdaftar di BEI (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI tahun 2017-2018)	X = CSR  Y = ROA	Secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan.
Ramadhani, dkk (2021)	Pengaruh <i>Green Accounting</i> dan Kepemilikan Saham Publik Terhadap Kinerja Keuangan dengan Pengungkapan CSR Sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019	X = CSR  Y = ROA	Pengungkapan CSR mampu mempengaruhi kinerja keuangan secara signifikan
Sholihah (2021)	Analisis Pengaruh GCG dan CSR Terhadap Kinerja Keuangan Tahun 2015-2019	X = Komisaris independen, Kepemilikan manajerial, CSR  Komite audit, Kepemilikan institusional  Y = ROA	Berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan  Tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

## **2.7 Pengembangan Hipotesis**

### **2.7.1 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan**

Komisaris independen memainkan peran penting dalam mengurangi terjadinya konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham. Komisaris independen yang merupakan agen pengawas seperti komisaris, berperan penting dalam proses pengambilan keputusan namun tidak memiliki hubungan dekat dengan pemegang saham perusahaan yang juga berperan menangkal ancaman dari luar. Sehingga memastikan bahwa proses peningkatan kinerja keuangan berjalan dengan lancar. Kinerja keuangan yang menunjukkan keberhasilan kinerja suatu perusahaan dapat diartikan sebagai kinerja yang dicapai melalui berbagai kegiatan yang telah dilakukan (Sarafina dan Saifi, 2017).

Hasil penelitian yang dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di BEI dengan sektor perusahaan dan periode yang berbeda menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh, Sejati (2018) dengan 19 perusahaan *real estate* dan properti pada tahun 2012-2014, Chasanah (2020) dengan 25 perusahaan *food and baverage* pada tahun 2013-2018, dan Sholihah (2021) dengan 10 sampel perusahaan *food and baverage* pada tahun 2015-2019 menemukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara komisaris independen terhadap kinerja keuangan. Mekanisme GCG yang dapat diukur dengan dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Sementara hasil penelitian sebelumnya juga menggunakan komisaris independen sebagai variabel independen menunjukkan hasil yang berbeda, penelitian dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di BEI dengan sektor dan periode yang berbeda seperti oleh Wiariningsih (2019) dengan 37 perusahaan pertambangan pada tahun 2013-2016, Adnyani (2020) dengan 55 perusahaan manufaktur pada tahun 2016-2018, dan Aziz (2021) dengan 16 perusahaan makanan dan minuman 2017-2019 yaitu memberikan hasil bahwa komisaris independen tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Komisaris independen hanya berperan sebagai pengawas dan pemberi nasehat bagi dewan direksi karena tidak secara langsung ikut mengelola dan menjalankan perusahaan, sehingga peran komisaris independen kurang efektif dalam peningkatan kinerja perusahaan.

Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris yang dalam hal ini diwakili oleh komisaris independen merupakan wakil mekanisme internal utama untuk mengendalikan dan mengawasi perilaku oportunisme manajemen untuk membantu menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajer demi meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, jadi jumlah komisaris independen dapat menjadi pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>1</sub>: Komisaris Independen berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020.

### 2.7.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan

Komite audit merupakan komite profesional independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, dengan tugas membantu dan memperkuat fungsi pengawasan (*oversight*) oleh dewan komisaris atau dewan pengawas atas proses pelaporan keuangan perusahaan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi *corporate governance*.

Hasil penelitian yang dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di BEI dengan sektor perusahaan dan periode yang berbeda menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara komite audit terhadap kinerja keuangan seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Chasanah (2020) dengan 25 perusahaan *food and baverage* pada tahun 2013-2018, dan Aziz (2021) dengan 16 perusahaan makanan dan minuman pada tahun 2017-2019 menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan dan positif antara komite audit terhadap kinerja keuangan. Mekanisme GCG yang dapat diukur dengan komite audit pada perusahaan dapat membantu menjalankan fungsi pengawasan serta berfungsi sebagai pengendalian pada manajemen perusahaan.

Sementara hasil penelitian sebelumnya juga menggunakan komite audit sebagai variabel independen menunjukkan hasil yang berbeda, penelitian dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di BEI dengan sektor dan periode yang berbeda seperti oleh Wiariningsih (2019) dengan 37 perusahaan pertambangan pada tahun 2013-2016, Adnyani (2020) dengan 55 perusahaan manufaktur pada tahun 2016-2018, dan Sholihah (2021) dengan 10 sampel perusahaan *food and baverage* pada tahun 2015-2019

yaitu memberikan hasil bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan dan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan apabila jumlah dan kualitas komite audit yang kemungkinan tidak mumpuni, akan menyebabkan rendahnya pengawasan yang dilakukan oleh komite audit.

Berdasarkan teori agensi, menyebutkan bahwa pembentukan komite audit merupakan cara untuk menyelesaikan masalah keagenan. Hal itu dikarenakan fungsi utama komite audit adalah memastikan kualitas laporan keuangan, melakukan *review* pengendalian internal perusahaan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit (Effendi, 2016). Dimana berdasarkan teori *stakeholder*, perusahaan harus menciptakan strategi yang digunakan untuk menjaga hubungan dengan para *stakeholder* dengan berkewajiban untuk mengungkapkan laporan sebagai informasi bagi *stakeholder* melalui laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>2</sub>: Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020.

### 2.7.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen, yaitu dewan direksi dan komisaris, yang berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan saham manajer dapat menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham. Persentase kepemilikan saham yang lebih tinggi dalam manajemen dapat menurunkan biaya keagenan dan secara otomatis mengurangi masalah keagenan antara agen dan prinsipal. Kepemilikan saham yang lebih tinggi dapat mencegah manajer untuk bertindak demi kepentingan mereka sendiri atau oportunistik, sehingga akan mensejajarkan kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976).

Hasil penelitian yang dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di BEI dengan sektor perusahaan dan periode yang berbeda menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Chasanah (2020) dengan 25 perusahaan *food and baverage* pada tahun 2013-2018, dan Sholihah (2021) dengan 10 sampel perusahaan *food and baverage* pada tahun 2015-2019 menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan dan positif antara kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan. Mekanisme GCG yang dapat diukur dengan kepemilikan manajerial akan mendorong penyatuan kepentingan antara prinsipal dan agen sehingga manajer akan bertindak sesuai keinginan pemegang saham yang nanti akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Sementara hasil penelitian sebelumnya juga menggunakan kepemilikan manajerial sebagai variabel independen menunjukkan hasil yang berbeda, penelitian dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di BEI dengan sektor dan periode yang berbeda seperti oleh Wiariningsih (2019) dengan 37 perusahaan pertambangan pada tahun 2013-2016, Adnyani (2020) dengan 55 perusahaan manufaktur pada tahun 2016-2018, dan Aziz (2021) dengan 16 perusahaan makanan dan minuman pada tahun 2017-2019 yaitu memberikan hasil bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan dan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan karena kepemilikan manajerial pada perusahaan di Indonesia rata-rata cenderung masih sangat rendah.

Berdasarkan teori agensi, menyebutkan bahwa struktur kepemilikan perusahaan salah satunya adalah kepemilikan manajerial mencerminkan pengawasan manajemen untuk mengurangi biaya keagenan. Kepemilikan manajerial berguna ketika manajer berbagi kepemilikan saham perusahaan. Manajer akan berusaha untuk meningkatkan nilai perusahaan sehingga manajer bisa menikmati keuntungan dari bagiannya tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>3</sub>: Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020.

#### 2.7.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi baik itu keuangan, berbadan hukum, luar negeri, maupun institusi lainnya yang terdapat di perusahaan. Kepemilikan institusional berperan penting untuk mencegah dan mengurangi konflik keagenan yang muncul. Kepemilikan institusional adalah pihak pengambil keputusan yang paling penting dalam sebuah perusahaan karena merupakan pemegang saham utama, juga dapat mengontrol dan memantau manajemen selama operasi perusahaan. Perusahaan dengan 5% atau lebih kepemilikan institusional mencerminkan kemampuan untuk memantau kinerja bisnisnya dengan baik. Pemantauan ini memastikan kesejahteraan pemegang saham dan menekan dampak aset institusional yang bertindak sebagai agen pengawas melalui investasi besar di pasar modal (Permanasari, 2010).

Hasil penelitian yang dilakukan pada perusahaan dengan sektor perusahaan dan periode berbeda menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan seperti yang dilakukan oleh Sejati (2018) dengan 19 perusahaan *real estate* dan properti pada tahun 2012-2014 dan Ningsih (2021) dengan 11 sampel perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI periode 2014-2018 menemukan terdapat pengaruh secara simultan antara kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan. Mekanisme GCG yang diukur dari kepemilikan institusional menunjukkan jumlah saham institusi berpengaruh dalam kinerja keuangan melalui peningkatan *return* yang dihasilkan aset.



Sementara hasil penelitian sebelumnya juga menggunakan kepemilikan institusional sebagai variabel independen menunjukkan hasil yang berbeda, penelitian dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di BEI dengan sektor dan periode yang berbeda seperti oleh Chasanah (2020) dengan 25 perusahaan *food and baverage* pada tahun 2013-2018, Sholihah (2021) dengan 10 sampel perusahaan *food and baverage* pada tahun 2015-2019, dan Aziz (2021) dengan 16 perusahaan makanan dan minuman pada tahun 2017-2019 yaitu memberikan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan dan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan karena kepemilikan institusional hanya sebagai pihak yang bersifat sementara dalam perusahaan dan lebih memfokuskan pada laba jangka pendek, dan belum mampu memaksimalkan fungsi kontrol yang dimiliki untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Berdasarkan teori agensi, menyebutkan bahwa struktur kepemilikan perusahaan salah satunya adalah kepemilikan institusional, memungkinkan manajer diawasi secara optimal dan menghindari perilaku oportunistik. Dengan begitu, manajer dapat mengurangi biaya keagenan dengan bertindak sesuai dengan kehendak pemegang saham.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>4</sub>: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020.

### 2.7.5 Pengaruh CSR Terhadap Kinerja Keuangan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau yang dikenal sebagai CSR bertujuan untuk memastikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya yang bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri. Peningkatan kualitas hidup dan lingkungan perusahaan secara langsung akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan yang menerapkan CSR akan memberikan manfaat kepada *stakeholder* maka akan timbul kepuasan dan apresiasi yang akan meningkatkan kinerja keuangan. (Ningsih, 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di BEI dengan sektor perusahaan dan periode yang berbeda menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara CSR terhadap kinerja keuangan seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Insani (2019) dengan sampel perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI tahun 2016-2017, Aji (2019) dengan 113 perusahaan manufaktur pada tahun 2016-2018, dan Rahmadhani (2021) dengan 39 sampel perusahaan perusahaan sektor industri dasar dan kimia periode 2015-2019 menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan dan positif antara CSR terhadap kinerja keuangan. Karena pengungkapan CSR akan menarik kepercayaan *stakeholder* berupa keputusan investasi.

Sementara hasil penelitian sebelumnya juga menggunakan CSR sebagai variabel independen menunjukkan hasil yang berbeda, penelitian dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di BEI dengan sektor dan periode

yang berbeda seperti oleh Chasanah (2020) dengan 25 perusahaan *food and beverage* pada tahun 2013-2018, Paskaboni (2021) dengan 41 sampel perusahaan pertambangan pada tahun 2017-2018 yaitu memberikan hasil bahwa CSR tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan ketika perusahaan menerbitkan CSR dengan maksud memberi sinyal kepada pasar, pasar belum mampu merespon dengan baik karena masih adanya variabel lain yang lebih berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan teori legitimasi, menyebutkan bahwa pengungkapan CSR dimana perusahaan akan menggunakan laporan tahunan untuk menggambarkan tanggung jawab lingkungan mereka. Dimana berdasarkan teori *stakeholder*, perusahaan harus menciptakan strategi yang digunakan untuk menjaga hubungan dengan para *stakeholder* dengan berkewajiban untuk mengungkapkan laporan sebagai informasi bagi *stakeholder* melalui laporan tahunan/keberlanjutan.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>5</sub>: CSR berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020.